



**RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN**

Jalan Indrakila Nomor 10 Kebumen Telp.(0287)385925, 385912
Fax. (0287)385925, Website : www.dpmptsp.kebumenkab.go.id,
Kode Pos 54311, Pos-el : dpmptspkabkebumen@yahoo.com



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, telah dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025.

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2025.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2025 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,


AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19690809 199803 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan pembangunan daerah, dan berkomitmen untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RKPD Perubahan dalam rencana operasional yang telah disusun dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan menggunakan rincian program kegiatan serta anggaran dalam tahun 2025 sesuai penyesuaian kegiatan.

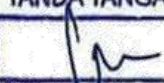
Penyusunan rencana kerja disamping berfungsi sebagai pedoman kerja, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh pegawai DPMPTSP Kabupaten Kebumen dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia. Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2025 perubahan ini memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh DPMPTSP mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Penyusunan dokumen rencana kerja perubahan tahun 2025 ini berdasarkan pada perubahan RKPD tahun 2025 yang telah ditetapkan pada tanggal 28 mei 2025 dan disampaikan melalui surat elektronik pada tanggal 15 juli 2025. Selaras dengan dokumen rencana strategis tahun 2021-2026, oleh karena itu penyusunan rencana kerja yang dilakukan fokus pada pengkajian terhadap kondisi eksisting DPMPTSP dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan, identifikasi masalah dan penetapan rencana kerja perubahan tahun 2025 ini.

Semoga buku rencana kerja ini dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan di Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 26 Juni 2025
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen

Joni Hernawan,S.T.,M.T
Pembina Utama Muda (IV-c)
NIP. 19700728 199803 1 006

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Krtma Karmila,S.Sos.,M.Eng	
Dyah Mustika P. St. M-Ling	

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	1
DASAR ATURAN	2
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI	7
DAFTAR TABEL	8
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang	9
B. Landasan Hukum	11
C. Maksud dan Tujuan	13
D. Sistematika Penulisan	14
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	20
A. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023) dan Capaian RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Kebumen	20
B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen	36
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	41
1. Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	41
2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi	42
3. Tantangan dan Peluang dalam Pelayanan PD	44
4. Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	45
D. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kegiatan Perangkat Daerah	47
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	67
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	68
A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	68
B. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah	69
C. Program dan Kegiatan	70
D. Pencapaian Atas Tujuan dan Sasaran	73
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	76
BAB V PENUTUP	94
A. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	94
DAFTAR LAMPIRAN	96

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen	40
Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kebumen	48
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP	70
Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah serta pelayanan terpadu satu pintu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan rencana kerja ini berpedoman pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dan merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Fokus tema pembahasan setiap tahunnya telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen, untuk DPMPTSP mengampu misi ketiga yaitu mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya

alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan terintegrasi dengan RPJPD Kabupaten Kebumen pada misi ke 4 yaitu Mengembangkan agrobisnis serta usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen menyusun rencana kerja tahun 2025, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta pelayanan terpadu satu pintu, adapun penyelenggaraan fungsi yang meliputi :

1. Penyusunan rencana dan program di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Perumusan kebijakan di bidang penanamn modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pelaksanaan administrasi dinas, dan
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan rancangan awals
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah
5. Perumusan rancangan akhir
6. Penetapan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen menyusun dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
 18. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025
 19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Perubahan rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Sedangkan tujuan dari rencana kerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025;

2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipasi terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;
3. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 disusun dengan sistematika sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2024, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

B. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi Tata Kelola, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan Tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH MEMUAT KAJIAN/REVIEW TERHADAP :

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2023) berdasarkan data LKPJ/LPPD/LKJIP
2. Perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan (tahun 2024)
3. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan :

1. Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal, dan/atau Indikator Kinerja Kunci (diambil dari Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah)
2. Capaian kinerja urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah (opsional bagi Perangkat Daerah yang memiliki kinerja urusan dengan mengambil data pada Narasi RKPD Tahun 2025)

- C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Pelayanan Daerah;
 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti Standar Pelayanan Minimal dan SDGs;
 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:
1. Perbandingan antara rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan (penetapan RKPD);
 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal Renja Perangkat Daerah, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait

langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan, kelurahan, dan desa serta pokok-pokok pikiran DPRD yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah (diambil dari hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan usulan Pokir DPRD)

BAB III.TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (misal Disdukcapil tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dsb)
- B. Tujuan dan Sasaran Renja PD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- C. Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai :
 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya:
 - Pencapaian visi dan misi kepala daerah (Pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah),
 - Pencapaian SDGs,
 - Pengentasan kemiskinan,
 - Pencapaian Standar Pelayanan Minimal,
 - Pencapaian IKU Perangkat Daerah
 - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - Pengembangan kewilayahan, Dsb.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 serta prakiraan maju tahun 2026 Perangkat Daerah selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun terkait ketersediaan anggaran.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2024 (tahun berjalan) diperlukan sebagai dasar penyusunan Renja Tahun Anggaran 2025 yang disusun pada tahun 2024. Evaluasi Renja tahun lalu (tahun 2024) dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dimaksud, dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir. Berdasarkan laporan tersebut kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan di DPMPSTSP adalah :

1. Pemberian sarana prasarana bagi anak dengan usia diatas 17 tahun, baik selagi menunggu proses perizinan maupun berkas/dokumen lainnya seperti Pojok Baca Digital (pocadi), tempat pojok baca, dan adanya minuman gratis;
2. Bersinergi dengan pihak akademik pada kegiatan jemput bola perizinan dimaksudkan agar mereka dapat mengelola perusahaanya dengan lebih baik dengan adanya pembelajaran terkait hal tersebut, seperti pemberian edukasi pada pelaku usaha dalam pengelolaan usahanya baik dalam manajemen pegawai sampai dengan keuangannya;
3. Semakin optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses dan sistem perencanaan;
4. Adanya monitoring dan evaluasi terkait proses perizinan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur baik penanganan, lama prosesnya, maupun hal teknis lainnya;
5. Perlu dilaksanakan secara rutin kegiatan gathering di setiap daerah/kelompok umkm secara berkala guna menampung aspirasi baik dalam permasalahan, keluhan, ataupun saran demi terlaksananya peningkatan investasi yang berdampak pada kemajuan ekonomi daerah, seperti kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu sosialisasi implementasi perizinan berusaha dengan sebagian besar peserta dari pelaku usaha di Kabupaten Kebumen.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2023) DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN KEBUMEN

Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Untuk penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2023 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2023.

Pada tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan anggaran sejumlah Rp 4.967.700.000,00 (Empat milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya, program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut seluruhnya dapat diselesaikan mencapai 96,10 persen dengan realisasi anggaran Rp 4.773.980.765,00 (Empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ratus enam puluh lima rupiah) atau sebesar 96,10 persen.

Adapun Capaian review hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2023, dan realisasi renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 disajikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Renja 2024 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100	100	100	100	100 %	100
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun + jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	13 Dokumen	8 Dokumen	13	13	100	13	34 Dokumen	100
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	7 Dokumen	13 Dokumen	7	7	100	7	27 Dokumen	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Renja 2024 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Dokumen	8 Dokumen	4	4	100%	6	18 Dokumen	100
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	24 Bulan	12	12	100	12	48 Bulan	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	28 Orang/ Bulan	56 Orang/ Bulan	28	28	100	28	112 Orang/ Bulan	100
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	2 Dokumen	4 Dokumen	2	2	100	12	18 Dokumen	100
1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pendidikan pelatihan pegawai sesuai tugas dan fungsi	100 %	100 %	100	100	100	100	100 %	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Renja 2024 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.3.1	Pendidikan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 Orang	94 Orang	50	50	100	50	194 Orang	100
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	24 Bulan	12	12	100	12	48 Bulan	100
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	2 Paket	1	1	100	1	4 Paket	100
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Renja 2024 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	2 Paket	1	1	100	1	4 Paket	100
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	2 Paket	1	1	100	1	4 Paket	100
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	4 Dokumen	2	2	100	2	8 Dokumen	100
1.4.6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	2 Paket	1	1	100	1	4 Paket	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Renja 2024 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Laporan	24 Laporan	12	12	100	12	48 Laporan	100
1.4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	25 books	40 books	25	25	100	25	90 books	100
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Unit	8 Unit	4	4	100	3	15 Unit	100
1.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah unit Mebel	0 Unit	2 Unit	2	2	100	0	4 Unit	100
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 Unit	5 Unit	12	12	100	0	17 Unit	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Renja 2024 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	0 Unit	1 Unit	10	10	100	0	11 Unit	100
1.5.4	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	2 Unit	0 Unit	0	0	1100	0	2 Unit	100
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	24 Bulan	12	12	100	12	48 Bulan	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2 Laporan	1	1	100	2	5 Laporan	100
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	2 Laporan	1	1	100	2	5 Laporan	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Renja 2024 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	2 Laporan	1	1	100	2	5 Laporan	100
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Unit	72 Unit	36	36	100	36	144 Unit	100
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21 Unit	40 Unit	21	21	100	21	82 Unit	100
1.7.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Mebel terpelihara	10 Unit	2 Unit	10	10	100	10	22 Unit	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Renja 2024 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	5 Unit	10 Unit	5	5	100	50	20 Unit	100
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara	1 Unit	2 Unit	1	1	100	1	4 Unit	100
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	409 Miliar Rupiah	1.053,175 Miliar Rupiah	405	628	156	405	2086,175 Miliar Rupiah	100
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen	2 Dokumen	1	1	100	1	4 Dokumen	100
2.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian	Jumlah dokumen kebijakan fasilitas/insentif dan	1 Dokumen	2 Dokumen	1	1	100	1	4 Dokumen	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Renja 2024 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	kemudahan penanaman modal								
2.1.2	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1	1	100	1	4 Kegiatan	100
2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah dokumen potensi investasi	2 Dokumen	4 Dokumen	2	2	100	1	7 Dokumen	100
2.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RUPM yg disusun	1 Dokumen	2 Dokumen	1	1	100	1	4 Dokumen	100
2.2.2	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada	Jumlah Peta Potensi investasi yang disusun	1 Dokumen	2 Dokumen	1	1	100	1	4 Dokumen	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Renja 2024 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)									
3	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah	5 Dokumen	45 Dokumen	5	5	100	5	55 Dokumen	100
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi Penanaman Modal	4 Dokumen	8 Kegiatan	4	4	100	4	16 Kegiatan	100
3.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	2 Dokumen	1	1	100	1	4 Dokumen	100
3.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi Penanaman Modal	4 Kegiatan	8 Kegiatan	4	4	100	4	16 Kegiatan	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Renja 2024 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100 %	100 %	100	100	100	100	100 %	100
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100 Dokumen	200 Dokumen	100	100	100	100	400 Dokumen	100
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan	600 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	110	110	100	120	430 Kegiatan Usaha	71,67

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Renja 2024 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah								
4.1.2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan nonperizinan	25 Orang	30 Orang	15	15	100	20	65 Orang	100
4.1.3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pemantauan, analisis dan pelaporan	600 Pelaku Usaha	1200 Pelaku Usaha	15	15	100	20	1.235 Pelaku Usaha	100
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha yang sesuai dengan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha yang Berlaku	40 Kegiatan Usaha	2.582 Kegiatan Usaha	40	40	100	40	2.662 Kegiatan Usaha	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Renja 2024 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Usaha yang Sesuai dengan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha yang Berlaku	40 Kegiatan Usaha	116 Kegiatan Usaha	40	40	100	40	196 Kegiatan Usaha	100
5.1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	60 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	60	60	100	60	220 Kegiatan Usaha	100
5.1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	60 Pelaku Usaha	100 Kegiatan Usaha	60	60	100	60	220 Pelaku Usaha	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Renja 2024 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	40 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	40	40	100	40	180 Kegiatan Usaha	100
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi	100 %	100 %	100	100	100	100	100 %	100
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintergrasi secara elektronik	2 Dokumen	4	2	2	100	2	8 Dokumen	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Renja 2024 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen data dan informasi perijinan dan non perizinan yang terintergrasi secara elektronik	2 Dokumen	4	2	2	100	2	8 Dokumen	100

Sumber : DPMPTSP Kebumen, 2024 (Data diolah)

Dari data sebagaimana Tabel 2.1 tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 6 program dengan 6 indikator kinerja program dan 13 kegiatan, 33 sub kegiatan dengan 37 indikator kinerja sub kegiatan;
 - b) Dari 6 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 5 indikator yang memenuhi target, 1 indikator yang melampaui target.
 - c) Dari 37 indikator kinerja sub kegiatan, 36 indikator telah memenuhi target, satu indikator pada sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak tercapai karena adanya Kebijakan Zero pengadaan kendaraan Dinas Operasional.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 6 program dengan 6 indikator kinerja program dan 13 kegiatan, 33 sub kegiatan dengan 37 indikator kinerja sub kegiatan;
 - b) Dari 6 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan semua indikator program dapat memenuhi target pada akhir periode Renstra;
 - c) Dari 37 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan satu indikator belum memenuhi target pada akhir periode Renstra.

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen nomor 120 Tahun

2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta pelayanan terpadu satu pintu. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Kebumen melaksanakan fungsi antara lain :

1. Penyusunan rencana dan program di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pelaksanaan Kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
7. Pelaksanaan administrasi;
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dalam mendorong peningkatan pelayanan tersebut diatas dan dalam mencapai target Indikator Kinerja pada tahun 2024 adalah :

1. Mendorong ketersediaan lahan investasi (industri, perdagangan, jasa, dan properti) dengan luasan yang memadai pada lokasi yang strategis, didukung dengan

ketersediaan infrastruktur penunjang dan aksesibilitas yang semakin baik;

2. Melaksanakan MOU (Memorandum of Understanding) antara pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dengan Pelayanan yang ada di MPP, seperti : Bank Jateng, Samsat, KPP Pratama, Disdukcapil, BP2MI, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan Negeri, BPKPD, Disdik, Disnaker, Taspen, PLN, Disperkimhub, DPUPR, dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap, dll;
3. Memperkuat kerja sama dalam melaksanakan kegiatan antara instansi horizontal maupun vertikal yang berkaitan dengan tupoksi DPMPTSP;
4. Memberikan layanan perizinan melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) kepada masyarakat secara tepat dan cepat;
5. Mengintensifkan pengawasan penanaman modal kepada pelaku usaha;
6. Mempermudah proses perizinan melalui penggunaan system informasi OSS untuk pengurusan NIB dan system informasi perizinan Kabupaten Kebumen melalui Siperi/Sistim Perizinan Terintegrasi;
7. Meningkatkan inovasi pelayanan, dengan melakukan layanan JEMPOL SATU (jemput bola satu pintu) yang langsung mendatangi pelaku usaha/pemohon izin. Pada tahun 2023, telah terlaksana ke 15 tempat di Kabupaten Kebumen, diantaranya : Kecamatan Ayah, Kecamatan Kecamatan Ambal, KPPS Ummat Sejahtera, Pasar Tumenggungan Kebumen, Asosiasi UMKM, saat Event KIE, Toserba Jadi Baru Kebumen, Kecamatan Klirong, dan Kecamatan Buluspesantren;
8. Memberikan sosialisasi/informasi pelayanan Perizinan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media online

- (Instagram, website, dll);
9. Merespon pesatnya minat pelaku usaha melalui sosialisasi dan fasilitasi kemudan berusaha;
 10. Melakukan inovasi pada penanam modal/pelaku usaha dengan ikut serta dalam penyelenggaraan event Kebumen International Expo (KIE), pameran, International Bussiness and Investment Forum (IBIF), dan memberikan penghargaan atas apresiasi pelaku usaha dalam upaya meningkatkan ekonomi di Kabupaten Kebumen melalui Anugerah Usaha Terbaik (AUT), dengan tujuan meningkatkan *spirit* pelaku usaha dalam pelaksanaan usahanya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kebumen dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Indikator kinerja utama pada tahun 2024 yaitu “Persentase Peningkatan Investasi” dengan target 1% dengan nilai investasi sebesar Rp. 405.000.000.000,00 (Empat ratur satu miliar rupiah) dapat tercapai melebihi target. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut serta kinerja disandingkan dengan target Rencana Strategis (Renstra), dipresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti tertera pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	Persentase Peningkatan Investasi		Persentase Peningkatan Investasi	2,15 %	3,18 %	4,21 %	6,27 %	16,36%	79,68	4,21 %	6,27 %	Peningkatan investasi per tahun anggaran
			Nilai Investasi PMA/PMDN	401.000. 000.000	405.000. 000.000	409.000. 000.000	413.000. 000.000	628.230 300.587	686.760 779.257	409.000. 000.000	413.00 0. 000.00 0	bersinergi dengan OPD lainnya

Sumber : LKJIP DPMPTSP, 2024 (data diolah)

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, hal tersebut terlihat dalam visi dan misi Kabupaten Kebumen dimana Kabupaten Kebumen memiliki visi “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat” . Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen, DPMPTSP termasuk dalam pelaksanaan pada misi ketiga yaitu “Mewujudkan daya saing ekonomi melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan”.

Pencapaian misi tersebut di atas juga diupayakan melalui program unggulan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Kebumen yaitu Tiada Hari Tanpa Pelayanan (THTP) dan stop korupsi, grafikasi dan pungli melalui sistem e-government dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada bab sebelumnya, maka kinerja pelayanan pada DPMPTSP lebih difokuskan pada promosi yang dilaksanakan dan pengawasan penanaman modal sehingga dapat meningkatkan daya tarik di mata investor baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, kinerja DPMPTSP juga diukur dari persentase peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Kebumen setiap tahunnya.

Kinerja DPMPTSP Kabupaten Kebumen juga dapat diukur dari pelayanan yang diberikan kepada investor dlm menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dalam merealisasikan investasinya di Kabupaten Kebumen. Tolok ukur kinerja lainnya adalah dalam pelayanan perizinan yang diberikan kepada investor dan penanganan pengaduan masyarakat.

Untuk mempercepat capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Kebumen, disusun prioritas kegiatan Tahun 2025, meliputi :

- a) Realisasi investasi PMDN/PMA (Pengawasan PSN dan Perpres 79/2019, Pengawasan proyek terkendala, promosi, kepedulian, dan kemitraan penanaman modal);
- b) Peningkatan pelayanan perizinan (*Online Service*, Kompetensi sumber daya manusia, penyelenggaraan/dukungan Mal Pelayanan Publik (MPP), Fasilitasi penyelesaian pengaduan, pendampingan pemenuhan komitmen perizinan).
- c) Peningkatan layanan informasi dan promosi (Digitalisasi promosi, peningkatan layanan informasi dan data melalui sistem informasi)

2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya dilakukan analisa terhadap keberhasilan dan kegagalan, yang meliputi penjelasan dalam menghadapi permasalahan - permasalahan pencapaian kinerja, beserta upaya - upaya yang telah dilakukan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya. Berikut permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tupoksi antara lain :

- a) Perlunya peningkatan kinerja pelayanan perizinan yang telah berbasis online;

Sebagian besar perizinan telah diproses melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh izin usahanya. Namun, dibalik kemudahan tersebut terdapat kendala dalam melakukan verifikasi perizinan oleh DPMPTSP. Salah satunya adalah DPMPTSP dan OPD Teknis cukup kesulitan mengikuti NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) terkait persyaratan dan waktu pemrosesan yang telah diatur dalam sistem OSS. Khususnya

bagi usaha yang beresiko menengah dan tinggi akan terkendala dalam penerbitan perizinan usahanya dan dapat menghambat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain OSS RBA, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) juga berhenti untuk diimplementasikan karena terkendala Perda perubahan yang mengatur tentang bangunan dan retribusi belum selesai disusun. DPMPTSP juga sering mengalami kendala dalam mengakses kedua aplikasi pusat tersebut. Beberapa penyebabnya antara lain karena aplikasi berjalan lambat, koneksi internet bermasalah, web traffic maupun seringnya maintenance pada aplikasi tersebut.

- b) Identifikasi dan analisa data potensi sumber daya investasi di daerah belum disusun secara komprehensif

Calon investor belum dapat mengakses informasi secara mudah, menarik dan komprehensif terkait potensi dan peluang investasi di Kabupaten Kebumen terutama tentang sektor usaha yang potensial dan ketersediaan lahan sesuai peruntukannya. Investor masih harus mencari informasi dari berbagai sumber/instansi mengenai sektor usaha apa yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Kebumen.

- c) Tingkat pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) oleh pelaku usaha belum optimal sehingga data realisasi investasi yang diperoleh belum maksimal meskipun target telah terpenuhi. Sistem pelaporan telah berbasis online, sebagian besar pelaku usaha tidak terlalu memperhatikan peran penting dari informasi yang diinputkan terkait dengan modal dan asset yang dikelola, Karena itu pelaku usaha tersebut tidak menyesuaikan sesuai perkembangan kegiatan usahanya;
- d) Pemenuhan SDM sesuai dengan aspek kuantitas, kualitas untuk mendukung fungsi promosi, perizinan, teknologi informasi, pengendalian, dan data. Sumber daya yang ada tidak terspesifik merata sesuai dengan analisis jabatan yang ada. Hal ini karena keterbatasan sumber daya sehingga

beberapa pegawai melakukan tugas bersama dengan tugas dari jabatan yang tidak tersedia sumber dayanya.;

- e) Belum optimalnya sarana dan prasarana di lingkup DPMPTSP Kabupaten Kebumen baik secara standar pelayanan maupun kecukupan pemenuhan terhadap kebutuhan. Keterkaitan erat dengan kebutuhan anggaran untuk menunjang kegiatan dan berakibat pada memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk jadwal kegiatan selanjutnya tidak menyesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana ini juga mempengaruhi promosi penanaman modal terutama guna melakukan promosi berbasis online demi untuk mewujudkan penyelenggaraan MPP Digital di Kabupaten Kebumen.

3. Tantangan dan Peluang dalam Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kebumen mempunyai tantangan, sebagai berikut :

- a) Infrastruktur digital promosi masih terbatas;
- b) Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi dalam bidang promosi, pelayanan perizinan, penyajian data investasi, dan pengawasan pelaksanaan perizinan berusaha;
- c) Belum optimalnya sinergi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, khususnya pelaku usaha menengah kecil (UMK) dan pendataan/pencatatan penanaman modalnya;
- d) Terbatasnya anggaran urusan penanaman modal.

Sedangkan peluang yang ada, antara lain :

- a) Pemeliharaan sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan berbasis online serta basis data izin secara berkala guna upaya digitalisasi layanan terintegrasi;
- b) Peluang investasi yang dipromosikan, prospektif, dan potensial;

- c) Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan OPD teknis terkait yang memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi dari hasil peninjauan lapangan;
- d) Tingginya dukungan pemerintah pusat terhadap iklim usaha yang kondusif;
- e) Adanya komitmen sumber daya manusia yang tersedia mampu melaksanakan tugas dengan baik;
- f) Ketersediaan infrastruktur guna mendukung penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen.

4. Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Kebumen tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan publik maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Isu yang dihadapi seperti berikut ini :

- a) Pelaku usaha belum menyampaikan LKPM karena ketidaktahuan adanya kewajiban penyampaian LKPM dan ketidaktahuan tata cara penyampaian LKPM. untuk menyampaikan pelaporan yang menjadi permasalahan di daerah sehingga laporan terkendala.
- b) Masih kurang optimalnya kegiatan promosi investasi di daerah
- c) Perizinan berusaha melalui OSS RBA masih dirasa sulit bagi masyarakat terutama pelaku usaha mikro
- d) Sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik yang dirasa masih kurang memadai guna mencukupi tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, tepat, dan efisien.
- e) Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dari seluruh unit kerja DPMPTSP yang terorganisir dalam rangka pendayagunaan potensi secara optimal, disertai pengembangan jumlah dan peningkatan kapasitas personil serta sarana prasarana yang memadai, terarah, dan berkesinambungan.

Langkah strategis yang akan dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Kebumen guna mengatasi isu-isu penting tersebut di atas, meliputi :

- a) Sejalan dengan hal tersebut, maka kebutuhan akan sarana dan prasara penunjang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan kebutuhan utama di masa yang akan datang;
- b) Keterbatasan sumber daya manusia merupakan salah satu kendala yang mempunyai konsekuensi terhadap perubahan aparatur pemerintah pelaksana kegiatan yang harus diimbangi dengan kemampuan teknis yang memadai yang bisa diperoleh dari adanya pelatihan.
- c) Meningkatkan digitalisasi promosi investasi melalui pembuatan konten video dan aktif dalam melakukan feedback kepada masyarakat secara intens pada sosial media maupun website resmi DPMPTSP Kabupaten Kebumen.
- d) Sosialisasi/pendampingan pengoperasian aplikasi OSS RBA perlu diintensifkan baik secara online maupun offline. Sehingga, pemohon dapat memahami alur serta persyaratan yang diperlukan dan verifikasi perizinan akan lebih mudah untuk dilaksanakan.
- e) Pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan untuk memperoleh data realisasi investasi yang lebih valid dan lengkap untuk mengukur perkembangan investasi daerah serta sebagai bahan dalam perumusan kebijakan investasi daerah.
- f) Digitalisasi informasi potensi dan peluang investasi Strategi promosi investasi yang efektif dan inovatif perlu dikembangkan untuk lebih mendorong pertumbuhan investasi daerah. Selain penyelenggaraan pameran investasi dan forum bisnis, penyediaan sistem informasi digital terkait potensi dan peluang investasi yang terintegrasi dengan RDTR dan peta lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) akan

mempermudah calon investor dalam membaca peluang investasi yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Kebumen

- g) Pengembangan promosi investasi melalui inovasi pelayanan yang dapat diterapkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi seperti lebih intensnya unggah konten di media sosial terkait informasi perizinan maupun potensi investasi sehingga meningkatkan minat investor dalam menanamkan sahamnya meningkat.

D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 perlu ditelaah kembali melalui analisis kebutuhan yang bersifat dinamis. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kesesuaian rencana program dan kegiatan dengan kebutuhan riil yang perlu direncanakan dan dianggarkan. Sehingga diharapkan hasil analisis kebutuhan pada akhirnya dapat selaras dengan Rancangan Akhir RKPD 2025 dan RKPD tahun 2024 yang ditetapkan.

Analisis kebutuhan dilakukan dengan mendasari pada Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2021-2026 khususnya rencana program dan kegiatan tahun 2025. Selain Renstra, analisis kebutuhan juga mendasari pada kebijakan-kebijakan vertikal yang bersifat dinamis serta dinamika yang muncul pada saat proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Kabupaten Kebumen

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.660.809.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.381.906.317	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13 Dokumen	27.036.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	13 Dokumen	38.080.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPT SP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	7 Dokumen	17.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPT SP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	7 Dokumen	Rp. 25.000.000	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPT SP	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dokumen	10.036.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPT SP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Rp. 13.080.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	3.969.231.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	3.286.401.317	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPT SP	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	28 Orang/Bulan	3.739.679.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPT SP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	Rp. 3.248.941.317	
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMPT SP	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	2 Dokumen	229.552.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMPT SP	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	2 Dokumen	Rp. 37.460.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Meningkatkan kualitas dan profesionalisme di bidang pelayanan publik	100 %	15.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pendidikan pelatihan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi	50 Orang	Rp. 45.000.000	
5	pendidikan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	DPMPT SP	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 Orang	15.000.000	pendidikan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	DPMPT SP	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 Orang	Rp. 45.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	49.860.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	Rp. 245.130.000	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPT SP	Jumlah unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	5.955.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPT SP	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	Rp. 30.000.000	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPT SP	Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0 Paket	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPT SP	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Paket	0	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPT SP	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	10.128.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPT SP	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	Rp. 30.000.000	
NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					

	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPT SP	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	12.784.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPT SP	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	Rp. 27.130.000	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPMPT SP	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Paket	2.928.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPMPT SP	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2 Dokumen	Rp. 1.500.000	
11	Penyediaan Bahan/Material	DPMPT SP	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	1 Paket	5.155.000	Penyediaan Bahan/Material	DPMPT SP	Jumlah paket bahann/material yang disediakan	1 Paket	Rp. 30.000.000	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPT SP	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Laporan	12.910.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPT SP	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp. 125.000.000	
13	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPT SP	Jumlah arsip yang ditata	25 Books	3.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPT SP	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis SKPD	12 Dokumen	Rp. 1.500.000	
NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					

	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4 Unit	77.591.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4 Unit	Rp. 122.899.000	
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPT SP	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit	70.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPT SP	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0 Unit	0	
15	Pengadaan Mebel	DPMPT SP	Jumlah paket mebel yang disediakan	0 Paket	0	Pengadaan Mebel	DPMPT SP	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Unit	0	
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPT SP	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Unit	7.591.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPT SP	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	Rp. 122.899.000	
NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					

	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPT SP	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan kantor lainnya yang disediakan	0 unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPT SP	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan kantor lainnya yang disediakan	0 Unit	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	358.785.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	Rp. 451.396.000	
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPT SP	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	5.474.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPT SP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp. 2.000.000	
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPT SP	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	327.819.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPT SP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp. 275.000.000	
NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					

	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPT SP	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	25.492.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPT SP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang sediakan	1 Laporan	Rp. 174.396.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	36 Unit	227.987.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	36 Unit	Rp.193.000.000	
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPT SP	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak, dan perizinannya	21 unit	195.208.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPT SP	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21 Unit	Rp. 120.000.000	
22	Pemeliharaan Mebel	DPMPT SP	Jumlah unit Mebel terpelihara	10 unit	2.855.000	Pemeliharaan Mebel	DPMPT SP	Jumlah unit Mebel terpelihara	10 Unit	Rp. 3.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPT SP	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	17.045.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPT SP	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit	Rp. 50.000.000	
24	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPT SP	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara	1 Unit	12.879.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPT SP	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya terpelihara	1 Unit	Rp. 20.000.000	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	409 Milyar Rupiah	158.448.000	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	405 Milyar Rupiah	Rp. 114.300.000	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen	92.883.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen	Rp. 51.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
25	Penetapan Kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	DPMPT SP	Jumlah dokumen kebijakan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen	49.173.000	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	DPMPT SP	Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen	Rp. 46.000.000	
26	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPT SP	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 kegiatan	43.710.000	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	DPMPT SP	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	12 Kegiatan Usaha	Rp. 5.000.000	Berganti nama subkegiatan
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen potensi investasi dan peluang usaha	1 Dokumen	65.565.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen potensi investasi dan peluang usaha	2 Dokumen	63.300.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
27	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPT SP	Jumlah dokumen RUPM serta jumlah peta potensi dan peluang usaha	1 dokumen	43.710.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPT SP	Jumlah dokumen RUPM serta jumlah peta potensi dan peluang usaha	1 Dokumen	Rp. 35.000.000	
28	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPT SP	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/kota	1 dokumen	21.855.000	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	DPMPT SP	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah	Rp. 28.300.000	Berganti Nama Subkegiatan
	Program Promosi Penanaman Modal		Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah	55 dokumen	262.265.000	Program Promosi Penanaman Modal		Jumlah dokumen promosi penanaman modal kabupaten/kota	3 Dokumen	Rp. 512.181.000	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah	55 dokumen	262.265.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen promosi penanaman modal kabupaten/kota	2 Dokumen	Rp.512.181.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
29	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPT SP	Jumlah dokumen strategi promosi Penanaman Modal	1 dokumen	109.283.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPMPT SP	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen	Rp. 452.181.000	
30	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMPT SP	Jumlah kegiatan promosi Penanaman Modal	4 kegiatan	152.982.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPT SP	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kab/kota	2 Dokumen	Rp. 60.000.000	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100 %	408.875.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100%	Rp. 149.800.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
30	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPT SP	Jumlah dokumen Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 dokumen	304.450.000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPT SP	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	5000 Pelaku Usaha	Rp. 99.876.000	Subkegiatan merger dengan layanan pengaduan
31	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPMPT SP	Jumlah dokumen Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	750 Pelaku Usaha	21.218.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPT SP	Jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	100 kegiatan Usaha	Rp. 25.000.000	Adanya perubahan nama sub kegiatan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	120 Kegiatan Usaha	26.723.000	Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	DPMPTSP	Jumlah kegiatan koordinasi penetapan pemberian fasilitas/insentif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	10 Dokumen	Rp. 24.924.000	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	30 %	462.924.000	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	382 Kegiatan Usaha	Rp. 604.104.000	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	108 Kegiatan Usaha	462.924.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal	108 Kali	Rp. 604.104.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	108 Kegiatan Usaha	462.924.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal	108 Kali	Rp. 604.104.000	
34	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	DPMPT SP	Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	60 Kali	71.924.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPMPT SP	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	13 Kegiatan Usaha	Rp. 90.615.000	Adanya penyesuaian nama sub kegiatan
35	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	DPMPT SP	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	8 Kali	271.000.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DPMPT SP	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimtek /sosialisasi implementasi perizinan berusaha dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	347 Pelaku Usaha	Rp. 332.258.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
36	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	DPMPT SP	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	40 kali	120.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	DPMPT SP	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisis dan diverifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	22 Kegiatan Usaha	Rp. 181.231.000	Adanya penyesuaian nama sub kegiatan
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi	100 %	15.000.000	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Prosentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi secara elektronik	100 %	Rp. 25.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan NonPerizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		jumlah dokumen data dan informasi perijinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	2 dokumen	15.000.000	Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan NonPerizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi secara elektronik	2 dokumen	Rp. 25.000.000	
37	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPT SP	jumlah dokumen data dan informasi perijinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	2 dokumen	15.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPT SP	Jumlah data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji, dan dimanfaatkan	4 dokumen	Rp. 25.000.000	
										5.787.291.317	

E. PENELAAHAN USULAN PRORAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rancangan Awal Renja Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen telah disesuaikan dengan rincian kebutuhan tahun 2024 yang telah di koordinasikan melalui forum perangkat daerah terkait dengan perencanaan kegiatan, penyampaian anggaran, dan evaluasi kinerja. Selain itu, hasil analisis kebutuhan pada program/kegiatan didasarkan pada dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025. Berdasarkan usulan program/kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen bersumber dari hasil Forum Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 5.787.291.317 untuk mendanai 6 Program 13 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan. Perwakilan dari LSM mengusulkan pagu anggaran DPMPTSP untuk tahun 2025 agar ditambahkan guna meningkatkan target investasi pelayanan perizinan dan kualitas layanan di MPP Kebumen.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Sesuai Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2024-2029, isu strategis Perencanaan Pembangunan sebagai berikut : Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem pengendalian perencanaan (*e-planning*) dan dikembangkan lebih lanjut melalui pemantauan dan evaluasi (*e-monev*) serta diharapkan akan menjadi basis *e-budgeting* yang dapat diterapkan. Dengan pengembangan system ini diharapkan dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, koheren, dan transparan.

Terkait dengan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang pelaksanaan kewenangan penerbitannya dilakukan melalui Lembaga OSS dalam bentuk tanda tangan elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Pelaksanaan perizinan berusaha meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), Penerbitan Izin Usaha dan Penerbitan Izin Komersial berdasarkan komitmen atau tanpa komitmen. Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam implementasi OSS (*Online Single Submission*) adalah pendampingan terhadap pelaku usaha dalam proses penginputan, pengawasan monitoring serta evaluasi.

Dalam rangka pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia, RKP Tahun 2025 memiliki tema **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**, diharapkan menjadi tahun yang mulai lepas dari tekanan kemajuan teknologi informasi dan merupakan tahun kunci pemantapan ekonomi yang terintegrasi berbasis online. Terdapat beberapa indikasi isu penting di tahun 2025 yaitu penguatan peningkatan cakupan layanan infrastruktur konektivitas regional konektivitas digital, serta sarana dan prasarana; penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik; fasilitasi

business matchmaking startup digital; dan pengembangan industri elektronik dan digital.

Berdasarkan dokumen perencanaan nasional, investasi menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional terkait ekspor dikarenakan :

1. Investasi akan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas apabila dapat dipenuhi oleh ketersediaan tenaga kerja yang ada akan menurunkan angka pengangguran pasca pandemi
2. Investasi akan meningkatkan perekonomian yang sempat turun karena masih pemulihan ekonomi melalui pembangunan unit usaha baru, peningkatan kapasitas produksi maupun perluasan usaha.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025, tema pembangunan adalah “Pemantapan kualitas infrastruktur dalam rangka pengembangan perekonomian & pertanian serta peningkatan profesionalisme aparatur & kualitas sumber daya manusia” dengan prioritas pembangunan, antara lain :

1. Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas Dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian Dan Pariwisata
2. Percepatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengurangan Pengangguran Berbasis Pembangunan Perdesaan
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat
4. Pemulihan Daya Saing Daerah Didukung Dengan Penyediaan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di DPMPTSP mendukung prioritas ke-5 (penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kondusivitas wilayah).

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan DPMPTSP, tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025
1.	Meningkatkan daya saing investasi	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	409.000.000.000

Sumber : Renstra DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2024

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Rencana kerja DPMPTSP mencakup 6 program yang terdiri dari 13 Kegiatan 32 sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Di Bidang PM yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

b. Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / kota
- Sub Kegiatan :
1. Penyusunan Rencana umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

2. Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)

2. Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi PM yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota
- b. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang PM yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
- b. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
- b. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha
- c. Pengawasan Penanaman Modal

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman

Modal Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- e. Penyediaan Bahan/Material.
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- g. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Mebel
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

D. PENCAPAIAN ATAS TUJUAN DAN SASARAN

Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen untuk Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026 sesuai dengan Raperda RPJMD 2021-2026 Kabupaten Kebumen. Kinerja urusan penanaman modal di Kabupaten Kebumen yang mengalami peningkatan investasi dan nilai IKM selama tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2021 sebesar 89,49%, tahun 2022 sebesar 92,88%, dan tahun 2023 sebesar 91,63% yang dapat diakses pada laman skm.kebumenkab.go.id.

Secara umum gambaran pelayanan publik di Kabupaten Kebumen telah mengalami peningkatan, salah satunya dikarenakan adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya percepatan dan kemudahan layanan di Kabupaten Kebumen. Peningkatan layanan publik dibuktikan dengan indeks survey kepuasan masyarakat untuk yang selalu dikategori sangat baik dengan selalu memperhatikan perbaikan mutu SDM, sarana prasarana serta layanan yang ramah anak atau bersifat inklusif, serta perbaikan prosedur pelayanan. Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu penyelesaian pelayanan perizinan kepada masyarakat. Selain itu kemudahan perizinan juga dimudahkan dengan adanya sistem informasi perizinan (Siperi) dengan aplikasi layanan One Single Submission (OSS) yang dapat

diakses 24 jam, sehingga memudahkan investor dalam mengurus perizinannya.

Pembangunan wilayah untuk mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, didukung dengan keberadaan infrastruktur wilayah. Strategi dan kebijakan pembangunan diarahkan pada pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang dapat meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, pengentasan, kemiskinan, pengurangan pengangguran, serta berkesinambungan (ramah lingkungan). Aksesibilitas daerah akan penyediaan wilayah strategis guna penanam modal/pelaku usaha sebagai bahan pertimbangan untuk mengalokasikan dana investasi mereka di Kabupaten Kebumen. Wilayah tersebut harus dibarengi dengan promosi, pemberian insentif dan kemudahan dalam prosesnya, sehingga mampu meningkatkan investasi PMDN/PMA.

Pemberian insentif berbentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan atau pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah. Kemudian, kemudahan investasi diimplementasikan penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi, pemberian bantuan teknis, percepatan pelayanan perizinan, dan pemberian advokasi. Dalam penyusunan rencana detail tata ruang wilayah Kabupaten Kebumen dengan berkoordinir dengan tim teknis terkait dalam upaya pemerataan yang memberikan peranan terhadap pengembangan kawasan strategis bagi calon penanam modal/investor. Fungsi pemerataan wilayah sebagai acuan pengembangan kawasan seperti kawasan budidaya, kawasan strategis, pariwisata, agrobisnis, dan kawasan potensi lainnya. Semakin bertambahnya investor yang masuk, dapat menjadi salah satu upaya dalam penyerapan tenaga kerja sehingga mengurangi kemiskinan maupun pengangguran. Dengan dilakukannya jemput bola pada wilayah ekstrem, terletak jauh dari pusat kota dan dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan terkait kemudahan fasilitasi terhadap pelaku usaha sehingga mampu memberikan motivasi untuk memajukan perekonomian daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen selalu memberikan pelayanan kepada

RENJA TAHUN 2025 PERUBAHAN DPMPSTP KABUPATEN KEBUMEN 74

masyarakat secara maksimal melalui Mal Pelayanan Publiknya. Ada beberapa piagam penghargaan yang telah diperoleh dari Ombudsman RI yaitu Piagam penghargaan predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) dan Pemberian penghargaan sebagai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kategori 3 Terbaik Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen..

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kedudukan rencana kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, dalam rangka pencapaian visi dan misi pada sektor pertumbuhan perekonomian daerah terutama di bidang investasi serta pelayanan masyarakat.

Pendanaan program dan kegiatan merupakan cara penyusunan pendanaan, perumusan prioritas serta perhitungan alokasi untuk masing-masing program. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahunnya, untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana yang saling terkait satu dengan lainnya. Rumusan rencana program dan kegiatan dan prakiraan maju DPMPTSP Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja ini.

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025 PERUBAHAN DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran Murni Tahun 2025	Anggaran Kegiatan Tahun 2025 Perubahan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		4.279.353.110	4.279.353.110								
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang urusan pemerintah daerah	3.774.731.000	3.774.731.000	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				100 %	4.670.677.547	DPMPTSP
2	18	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	27.020.000	27.020.000	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				13 Dokumen	18.700.000	DPMPTSP
2	18	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	20.490.000	20.490.000	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalism e aparatur	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	7 dokumen	13.000.000	DPMPTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran Murni Tahun 2025	Anggaran Kegiatan Tahun 2025 Perubahan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	18	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6.530.000	6.530.000	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	6 laporan	5.700.000	DPMPTSP
2	18	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	2.861.075.000	2.861.075.000	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	3.970.130.671	DPMPTSP
2	18	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2.826.952.000	2.826.952.000	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	28 orang/ bulan	3.941.130.671	DPMPTSP
2	18	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	34.123.000	34.123.000	Kab. Kebumen, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	2 dokumen	28.000.000	DPMPTSP
2	18	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan diklat dan pelatihan pegawai	0	0	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 Persen	50.000.000	DPMPTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran Murni Tahun 2025	Anggaran Kegiatan Tahun 2025 Perubahan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	18	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0	0	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	50 orang	50.000.000	DPMPTSP
2	18	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	168.130.000	168.130.000	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 %	118.000.000	DPMPTSP
2	18	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30.000.000	30.000.000	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	1 paket	20.000.000	DPMPTSP
2	18	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	0	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	0 paket	0	DPMPTSP
2	18	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	30.000.000	30.000.000	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	1 paket	20.000.000	DPMPTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran Murni Tahun 2025	Anggaran Kegiatan Tahun 2025 Perubahan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	18	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	30.000.000	30.000.000	Kab. Kebumen, SemuaKeca- matan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalism e aparatur	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	1 paket	20.000.000	DPMPTSP
2	18	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	27.130.000	27.130.000	Kab. Kebumen, SemuaKeca- matan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalism e aparatur	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	1 paket	20.000.000	DPMPTSP
2	18	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	1.500.000	1.500.000	Kab. Kebumen, SemuaKeca- matan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalism e aparatur	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	2 dokumen	1.500.000	DPMPTSP
2	18	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	30.000.000	30.000.000	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalism e aparatur	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	1 Paket	20.000.000	DPMPTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran Murni Tahun 2025	Anggaran Kegiatan Tahun 2025 Perubahan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
2	18	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	125.000.000	125.000.000	Kab. Kebumen, SemuaKeca- matan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalism e aparatur	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	12 Laporan	35.000.000	DPMPTSP
2	18	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1.500.000	1.500.000	Kab. Kebumen, SemuaKeca- matan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalism e aparatur	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	25 Dokumen	1.500.000	DPMPTSP
2	18	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	122.069.000	122.069.000	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4 Unit	30.000.000	DPMPTSP
2	18	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yg disediakan	0	0	Kab. Kebumen, SemuaKeca- matan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalism e aparatur	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	0 Unit	0	DPMPTSP
2	18	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan unit mebel	0	0	Kab. Kebumen, SemuaKeca- matan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalism e aparatur	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	5 unit	0	DPMPTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran Murni Tahun 2025	Anggaran Kegiatan Tahun 2025 Perubahan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	18	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	122.069.000	122.069.000	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	2 unit	30.000.000	DPMPTSP
2	18	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasaran gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0	0	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	1 unit	0	DPMPTSP
2	18	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	421.537.000	414.337.000	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	327.846.876	DPMPTSP
2	18	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000	2.000.000	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	1 laporan	2.000.000	DPMPTSP
2	18	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sda, dan listrik yang disediakan	275.000.000	275.000.000	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	1 laporan	200.846.876	DPMPTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran Murni Tahun 2025						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	18	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	144.537.000	137.337.000	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	1 laporan	125.000.000	DPMPTSP
2	18	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	182.100.000	182.100.000	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				36 Unit	156.000.000	DPMPTSP
2	18	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	120.000.000	120.000.000	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	21 unit	111.000.000	DPMPTSP
2	18	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	3.000.000	3.000.000	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	10 unit	1.500.000	DPMPTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran Murni Tahun 2025	Anggaran Kegiatan Tahun 2025 Perubahan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	18	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	39.100.000	39.100.000	Kab. Kebumen, SemuaKeca- matan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalism e aparatur	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	5 unit	26.000.000	DPMPTSP
2	18	01	2,09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya terpelihara	20.000.000	20.000.000	Kab. Kebumen, SemuaKeca- matan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalism e aparatur	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	1 unit	17.500.000	DPMPTSP
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGA N IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	56.688.300	56.688.300	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				418,00 Miliar rupiah	45.000.000	DPMPTSP
2	18	02	2,01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal	Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	32.316.500	32.316.500	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	20.000.000	DPMPTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran Murni Tahun 2025	Anggaran Kegiatan Tahun 2025 Perubahan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	18	02	2,01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif danKemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	26.501.500	26.501.500	Kab. Kebumen, SemuaKeca- matan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPMPTSP Kabupaten Kebumen	1 Dokumen 1 dokumen	0	DPMPTSP
2	18	02	2,01	02	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	3.815.000	3.815.000	Kab. Kebumen, SemuaKeca- matan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPMPTSP Kabupaten Kebumen	1 kegiatan 12 Kegiatan usaha	0	DPMPTSP
2.	18	02	2.01	03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	0	0	Kab. Kebumen, SemuaKeca- matan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPMPTSP Kabupaten Kebumen	2 Dokumen	20.000.000	DPMPTSP
2	18	02	2,02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen potensi investasi dan peluang usaha	24.371.800	24.371.800	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 dokumen	25.000.000	DPMPTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran Murni Tahun 2025	Anggaran Kegiatan Tahun 2025 Perubahan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
2	18	02	2,02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	7.155.000	7.155.000	Kab. Kebumen, SemuaKeca- matan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulang an kemiskinan	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	1 dokumen	0	DPMPTSP
2	18	02	2,02	02	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah Peta Potensi investasi yang disusun	17.216.800	17.216.800	Kab. Kebumen, SemuaKeca- matan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulang an kemiskinan	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	1 dokumen	25.000.000	DPMPTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran Murni Tahun 2025	Anggaran Kegiatan Tahun 2025 Perubahan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen promosi penanaman modal Kabupaten/Kota		262.485.410	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, SemuaKelu rahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Dokumen		DPMPTSP
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen promosi penanaman modal Kabupaten/Kota		262.485.410	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	178.044.000	DPMPTSP
2	18	03	2,01	01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	209.483.000	247.506.410	Kab. Kebumen, SemuaKeca matan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulang an kemiskinan	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	1 dokumen	178.044.000	DPMPTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran Murni Tahun 2025	Anggaran Kegiatan Tahun 2025 Perubahan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
2	18	03	2,01	02	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	14.979.000	14.979.000	Kab. Kebumen, SemuaKeca- matan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulang an kemiskinan	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	2 dokumen	0	DPMPTSP
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	99.930.000	99.930.500	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			100 %	100.700.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran Murni Tahun 2025	Anggaran Kegiatan Tahun 2025 Perubahan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	99.930.000	99.930.500	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 Persen	100.700.000	DPMPTSP	
2	18	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan NonPerizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.204.000	10.204.000	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualite as Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan profesionalism aparatur	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	15 Dokumen	8.700.000	DPMPTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran Murni Tahun 2025	Anggaran Kegiatan Tahun 2025 Perubahan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	18	04	2,01	02	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan NonPerizinan Penanaman Modal	66.126.500	66.126.500	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualite as Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan profesionalism aparatur	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	5000 Pelaku Usaha	80.000.000	DPMPTSP
2	18	04	2,01	03	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	23.600.000	23.600.000	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualite as Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Profesionalism aparatur	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	10 Kegiatan Usaha	12.000.000	DPMPTSP
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kegiatan usah yng sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	64.002.300	64.002.300	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 Persen	58.000.000	DPMPTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran Murni Tahun 2025	Anggaran Kegiatan Tahun 2025 Perubahan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan usah yng sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	64.002.300	64.002.300	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				838 Kegiatan Usaha	58.000.000	DPMPTSP
2	18	05	2.01	01	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Jumlah Kegiatan Usaha dariPelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	17.400.000	17.400.000	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3.Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata pemerataan ekonomi dan penanggulang an kemiskinan		30 Kegiatan usaha	14.000.000	DPMPTSP
2	18	05	2.01	02	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPMPTSP Kabupaten Kebumen	40 Pelaku Usaha	19.000.000	DPMPTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran Murni Tahun 2025	Anggaran Kegiatan Tahun 2025 Perubahan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	18	05	2,01	03	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal	46.602.300	46.602.300	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulang an Kemiskinan	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	50 Kegiatan Usaha	25.000.000	DPMPTSP
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan yang terintegrasi secara elektronik	21.515.600	21.515.600	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				100 Persen	12.000.000	DPMPTSP
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi secara elektronik	21.515.600	21.515.600	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				10 Dokumen	12.000.000	DPMPTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran Murni Tahun 2025	Anggaran Kegiatan Tahun 2025 Perubahan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan InformasiPerizina n dan Non PerizinanBerbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Jumlah dokumen data dan informasi perijinan dan nonperizinan yang terintergrasi secara elektronik	21.515.600	21.515.600	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	DPMPTSP Kabupaten Kebumen	10 Dokumen	12.000.000	DPMPTSP
Jumlah							4.324.576.520	4.279.353.110							5.064.421.547	

Sumber : DPMPTSP Kab.Kebumen, 2025 (data diolah)

Adapun beberapa perubahan pada rencana kerja tahun 2025 yang telah disesuaikan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD) dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Pengesahan perubahan rencana kerja perangkat daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2025. Agar memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, maka telah dilakukan beberapa perubahan pada subkegiatan sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dan Subkegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Berkurang sebesar Rp.7.200.000 dikarenakan menyesuaikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.
2. Program promosi penanaman modal, Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, dan subkegiatan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota. Adapun penambahan anggaran sebesar Rp. 38.023.410 dengan rincian belanja yang digunakan dalam penyelenggaraan promosi daerah dan belanja souvenir bagi pelaku usaha serta tamu undangan kegiatan business forum sebagai upaya agar produk Kabupaten Kebumen semakin berkembang dan go Nasional.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sasaran program dan kegiatan pembangunan di dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 telah diselaraskan dengan sasaran yang tercantum dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, sehingga turut berkontribusi terhadap capaian sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta perkembangan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman operasional tahunan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai instrument untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD

Penyusunan Perubahan Renja didasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, dengan tahapan :

3. Persiapan penyusunan;
4. Penyusunan rancangan awal;
5. Penyusunan rancangan;
6. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
7. Perumusan rancangan akhir; dan
8. Penetapan.

Selanjutnya perubahan renja perangkat daerah tahun 2025 digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Kebumen, 26 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen



Joni Hernawan, S.T., M.T

Pembina Utama Muda (IV-c)

NIP. 19700728 199803 1 006

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DOKUMENTASI

FORUM PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN



